



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154
Laman inspektorat.sumutprov.go.id, Pos-el inspektorat@sumutprov.go.id

Medan, 29 September 2026

Nomor : 000.2.3.2/12804/ITPPASU/IX/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Dokumen

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara
di
Medan

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Nomor 000.3.3.2/15976/01/XIV/2026 tanggal 14 September 2026 perihal Permintaan Dokumen, terkait dukungan dalam rangka Rapat Tahapan, Penyampaian dan Agenda Cara Pengisian SAQ Monev KIP Tahun 2026, terlampir disampaikan:

1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya Tahun 2024–2026; dan
2. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya Tahun 2024–2026.

Demikian disampaikan, untuk ditindaklanjuti.



Inspektur,

Sulaiman Harahap, SH, M.SP, CGCAE, CFrA
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690610 199703 1 005

**JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA
LAPORAN PENINDAKANNYA 2024-2026**

TAHUN	JENIS DAN JUMLAH PENGADUAN	GAMBARAN UMUM PELANGGARAN	LAPORAN PENINDAKAN
1	2	3	4
2024	Pengaduan masyarakat 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) pengaduan.	Pengaduan masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah (PD) dan BUMD Provsu serta Pengaduan Masyarakat dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Dari total sebanyak 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) pengaduan: 1. Telah selesai ditindaklanjuti 290 (dua ratus sembilan puluh) 2. Dalam proses 57 (lima puluh tujuh) 3. Tidak memenuhi syarat 22 (dua puluh dua)
2025	1. Kerugian keuangan negara 247 (dua ratus empat puluh tujuh) pengaduan 2. Pelanggaran disiplin PNS/kode etik 32 (tiga puluh dua) pengaduan	1. Audit Investigatif dilakukan terhadap 39 (tiga puluh sembilan) objek dan 49% diantaranya berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) 2. Hasil pemeriksaan khusus yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan daerah sampai dengan Semester II Tahun 2025 sebanyak 18 (delapan belas) kasus dengan total temuan sebesar Rp17.249.648.915,89.- (tujuh belas milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah) dari jumlah temuan tersebut telah dilakukan	Jumlah PNS yang direkomendasikan penjatuhan hukuman disiplin 61 (enam puluh satu) orang, terdiri dari: 1. Disiplin berat 35 (tiga puluh lima) orang 2. Disiplin sedang 5 (lima) orang 3. Disiplin ringan 21 (dua puluh satu) orang

		penyetoran ke Rekening Kas Negara/Daerah sebesar Rp6.384.247.205,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam rupiah)	
2026 (s.d. akhir Triwulan II)	1. Kerugian keuangan negara 66 (enam puluh enam) pengaduan 2. Pelanggaran disiplin PNS/kode etik 47 (empat puluh tujuh) pengaduan 3. Non Pengawasan 19 (Sembilan belas) pengaduan	Jumlah pemeriksaan khusus yang terindikasi penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan daerah 14 (empat belas) pemeriksaan khusus	Jumlah PNS yang direkomendasikan penjatuhan hukuman disiplin = 16 orang, terdiri dari: 1. Disiplin berat 8 (delapan) orang 2. Disiplin sedang 4 (empat) orang 3. Disiplin ringan = 4 (empat) orang


 Inspektur,

 Sulaiman Harahap, SH, M.SP, CGCAE, CFrA
 Pembina Utama Madya/IV.d
 NIP. 19690610 199703 1 005

JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL
SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA 2024-2026

TAHUN 2024

TAHUN	JENIS PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH	GAMBARAN UMUM	LAPORAN PENINDAKAN
2024	Audit Kinerja	3	Hasil audit Kinerja pada PD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan 3 temuan dan 100% adalah temuan kelemahan sistem pengendalian intern	Hasil audit Kinerja pada PD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan 3 (tiga) rekomendasi dan 100% adalah rekomendasi perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi.
2024	Audit Dengan Tujuan Tertentu	7	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2024 telah melaksanakan audit dengan tujuan tertentu sebanyak 7 (tujuh) audit dengan jenis audit yaitu Audit Ketaatan, Audit Investigatif, Audit Probitiy, Audit Rinci Perangkat Daerah, Audit Rinci Kabupaten/Kota, Audit Pengelolaan Keuangan	Audit Investigatif pada Tahun 2024 dilakukan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali, dengan 17 (tujuh belas) kasus diantaranya berindikasi tindak pidana korupsi
2024	Reviu	43	Sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan review antara lain : Reviu Detail Engineering Design (DED), Reviu Atas Kecukupan SDM dan Anggaran, Reviu Pelayanan Publik, Reviu pekerjaan yang melewati TA 2023, Reviu HPS, Reviu DAU, Reviu DAK, Reviu HPS, KAK dan RAB Bidang PB PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut Wilayah Sumatera Utara, Review KUA-PPAS.	
2024	Evaluasi	49	Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penugasan evaluasi antara lain: Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Evaluasi Reformasi Birokrasi, Evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas	
2024	Monitoring dan Pemantauan	31	Sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan monitoring dan pemantauan antara lain : Monitoring Pelaksanaan Tenaga Kerja, Monitoring SPBE, Monitoring Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Monitoring Laporan Keuangan, Monitoring Aspek Pengelolaan PKB dan BBNKB, Monitoring Pelaporan Pajak, Monitoring Penurunan Prevelensi Stunting, Monitoring Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, Monitoring Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Monitoring Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat, Monitoring Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Monitoring Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Ijen kemendagri, Monitoring Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, Monitoring Kemajuan Pencairan Hibah, Monitoring Percepatan Pencapaian Target Pengarusutamaan Gender (PUG), Monitoring Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi, Pemantauan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pemantauan Atas Hasil Proses Pertangungjawaban BMD, Pemantauan Pembangunan Zona Integritas (ZI).	

TAHUN 2025

TAHUN	JENIS PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH	GAMBARAN UMUM	LAPORAN PENINDAKAN
2025	Audit Kinerja	6	Hasil audit Kinerja pada PD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 mengungkapkan 269 (dua ratus enam puluh sembilan) kejadian.	Hasil audit Kinerja pada PD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan 407 (empat ratus tujuh) rekomendasi yang harus diselesaikan oleh PD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
2025	Audit Dengan Tujuan Tertentu	10	Audit tujuan tertentu yang dilakukan terdiri dari Audit Investigatif, Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, Audit Ketaatan, Audit Probitiy, Audit Rinci Perangkat Daerah, Audit Rinci Kabupaten/Kota, Audit Pengelolaan Keuangan Desa dan Audit Pengelolaan Dana BOSP. Audit Investigatif pada Tahun 2025 dilakukan sebanyak 54 (lima puluh empat) kali, dengan 32 (tiga puluh dua) kasus diantaranya berindikasi tindak pidana korupsi.	Berdasarkan audit investigatif terdapat 32 (tiga puluh dua) kasus yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) terdapat 1 (satu) kasus yang dilimpahkan ke Instansi Penyidik. Hasil tindak lanjut penyidik atas 1 (satu) kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik (Kejaksaaan) berpotensi mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp564.573.746,00 (lima ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah)
2025	Reviu	184	Sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan review antara lain : Reviu kegiatan yang tidak dapat diselesaikan proses pembayarannya, Reviu Dokumen LPPD, Reviu DAK, Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah, Reviu Pelaksanaan PBJ, Reviu DAU, Reviu Laporan Keuangan, Reviu HPS, Reviu P.RKPD, Reviu RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, Reviu Bantuan Keuangan Provinsi, Reviu hibah. Reviu atas kecukupan SDM dan alokasi anggaran, Reviu Renstra. Reviu Layanan Perizinan, Reviu Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Reviu Pengelolaan BMD, Reviu Rancangan KUA dan PPAS, Reviu Manajemen ASN, Reviu Pelayanan Publik, Reviu Pengelolaan Kas Bendahara Perangkat Daerah	
2025	Evaluasi	92	Evaluasi yang dilakukan adalah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Evaluasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).	
2025	Monitoring dan Pemantauan	37	Sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan monitoring dan pemantauan antara lain : Monitoring Pelaporan P3DN dan RUP, Monitoring Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Monitoring Proses Pengadaan CPNS, Pemantauan laporan LHKAN, Pemantauan TLHP Inspektorat Provsu, BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, BPKP RI Sumatera Utara serta Inspektorat Jenderal Kemendagri, Monitoring Tindak Lanjut Evaluasi AKIP, Monitoring Reformasi Birokrasi, Monitoring Pembangunan Zona Integritas, Monitoring pengendalian Inflasi, Monitoring Pengurusutamaan Gender, Monitoring percontohan Desa Antikorupsi, Monitoring pada KPRI.	

TAHUN 2026

TAHUN	JENIS PENGAWASAN INTERNAL	JUMLAH	GAMBARAN UMUM	LAPORAN PENINDAKAN
2026	Audit Ketaatan/ Kepatuhan	3	Pemeriksaan Ketaatan terhadap 3 Perangkat Daerah menunjukkan bahwa kegiatan Perangkat Daerah masih perlu untuk ditingkatkan. Pemeriksaan Ketaatan yang dilakukan meliputi Kepatuhan atas Belanja Tahun Anggaran 2026 dan Kepatuhan terhadap Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 dan 2026. Pemeriksaan yang dilakukan menghasilkan 19	Hasil Audit Ketaatan/ Kepatuhan pada 3 Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghasilkan 36 (tiga puluh enam) rekomendasi yang harus diselesaikan.
2026	Audit Dengan Tujuan Tertentu	3	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) menghasilkan 187 (seratus delapan puluh tujuh) temuan. Masih terdapat adanya kelemahan pada sistem pengendalian internal, perencanaan, dan monitoring, sehingga pelaksanaan perbaikan perlu didukung dengan rencana aksi yang jelas, penguatan tata kelola pada tahap perencanaan, melengkapi dokumen pendukung dan memastikan kesesuaian dan sinkronisasi antar dokumen.	Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terdapat 198 (seratus sembilan puluh delapan) rekomendasi yang harus diselesaikan.
2026	Reviu	88	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara melaksanakan 88 (delapan puluh delapan) Reviu pada Semester I Tahun 2026. Reviu yang dilakukan terdiri atas 34 (tiga puluh empat) Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah, 40 (empat puluh) Reviu Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah, 4 (empat) Reviu atas DAK Fisik, dan 10 (sepuluh) Reviu Lainnya.	Saran hasil reviu secara keseluruhan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui peningkatan akuntabilitas kinerja, pengelolaan risiko, serta kualitas administrasi dan pengelolaan data. Perangkat Daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan, penguatan, dan pelaporan kinerja agar lebih selaras dengan dokumen perencanaan serta didukung oleh data yang valid, SOP yang memadai, dan sistem pelaporan yang terintegrasi secara digital.
2026	Evaluasi	71	Evaluasi terhadap Perangkat Daerah pada Semester I Tahun 2026 dilaksanakan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) Evaluasi. Evaluasi yang dilakukan terdiri atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada 32 (tiga puluh dua) Perangkat Daerah, Evaluasi Pengelolaan Risiko pada 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah, dan 4 (empat) Evaluasi Lainnya.	Saran hasil Evaluasi diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan risiko melalui penyelenggaraan perencanaan, peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja, penguatan keandalan data serta bukti dukung, dan optimalisasi monitoring serta tindak lanjut hasil evaluasi. Secara keseluruhan, perbaikan diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas program, efisiensi anggaran berbasis outcome, serta budaya kinerja dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
2026	Monitoring	45	Monitoring yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah mencakup Monitoring P3DN sebanyak 41 monitoring serta terdapat 4 Monitoring lainnya. Secara keseluruhan, hasil Monitoring menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan komitmen Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan P3DN, tidak hanya pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga melalui penguatan perencanaan, pelaksanaan, dokumentasi, serta pengendalian pengadaan barang/jasa agar penggunaan produk dalam negeri dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.	Monitoring yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah menghasilkan 140 saran untuk Monitoring P3DN dan 4 saran untuk Monitoring lainnya.



Inspektur,
 Sulaiman Harahap, SH, M.SP, CGCAE, CFRA
 Pembina Utama Madya/IV.d
 NIP. 19690610 199703 1 005